

PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

(Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)

Oleh :

Febriyanto, Irma Irawati, P*, & Alqaf Harto Maryono.*

E-mail : irma.puspaningrum@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik belum mampu diwujudkan dengan baik oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah bahkan pada level pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep. Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran tersebut adalah peran dalam menjalankan visi yang dimilikinya, peran sebagai pengendali dan penghubung dalam organisasinya, peran sebagai motivator untuk bawahannya, dan peran penyampai informasi-informasi yang berkenaan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam menjalankan peran-peran tersebut diketahui bahwa visi yang dimiliki oleh Kepala Desa masih sulit dijangkau dan kurang terukur. Disamping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber Daya Anggaran dan Sarana prasarana yang dimilikinya kurang dikendalikan. Sedangkan bentuk motivasi yang diberikan hanya berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan.

Kata Kunci : Tata kelola pemerintahan, Kepala Desa, Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep

A. PENDAHULUAN

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di negara kita sebenarnya telah didukung oleh *political will* dari pemerintah melalui implementasi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih berdaya.

Pada gilirannya nanti, keberdayaan ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perwujudan *good governance* di Indonesia. Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan dalam mewujudkan *good governance*, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam konteks ini sistem manajemen sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Upaya tata kelola pemerintahan desa yang baik sudah banyak dilakukan di beberapa daerah yang dikenal dengan program-program inovatifnya, misalnya seperti Desa Argorejo dan Kebon Agung di daerah Bantul yang telah mengangkat Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten *Best Practice* di Indonesia. (Lincoln Arsyad, 2011:73). Kondisi ini berbanding terbalik dengan Desa-desa yang berada di lingkungan Kabupaten Sumenep. Dimana keadaan desa-desa di Kabupaten Sumenep ini masih memprihatinkan.

* Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep

Keadaan hampir serupa juga terdapat pada Desa Gunggung Kecamatan Batuan dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum mampu mencapai peningkatan yang signifikan. Ditambah lagi dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Gunggung kepada masyarakat telah mengalami penurunan dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi pembangunan desa masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Desa Gunggung Kecamatan Batuan kabupaten Sumenep”

Tujuan Penelitian, Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep”

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995:751). menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah.

Menurut Hendropuspito mengungkapkan bahwa istilah peranan (dalam sandiwara, 2001;134) oleh para ahli sosiologi diahlikan ke panggung sandiwara, diberi isi dan fungsi baru yang disebut peranan sosial. Istilah peranan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai lakon, bahkan masyarakat lakon itu sendiri. Masyarakat adalah suatu lakon yang masih aktual, lakon yang besar, yang terdiri dari bagian-bagian dan pementasannya diserahkan kepada anggota-anggota masyarakat. Lakon masyarakat itu disebut fungsi atau tugas masyarakat. Jadi peranan sosial adalah bagian dari fungsi sosial masyarakat.

Definisi Good Governace

Sedermayanti (2009, 273), menyatakan pemerintahan atau dalam bahasa inggris “*Governance*” yaitu “*the act, manner of governing*” berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Kooiman dalam Sedermayanti (2009, 273), bahwa *governance* serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. (Wahab, 2002:34).

Prinsip-prinsip Good Governance

Good Governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *Governance* korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, *fairness*,responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216).

Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penerapan Hukum (*Fairness*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Tanggung jawab (*Responsiveness*)
5. Orientasi (*Consensus Orientation*)
6. Keadilan (*Equity*)
7. Efektivitas (*Effectiveness*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Strategi visi (*Strategic vision*)

Kepemimpinan

Beberapa pakar mendefinisikan tentang Kepemimpinan, diantaranya James M. Kouzes dan Barry Z. Posner (2004:3), mengatakan kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kartono (2005:153), mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.

Dari definisi kepemimpinan tersebut di atas mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi (Pasolong, 2008).

Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Menurut (Nawawi, 2006), Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedang gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi/bawahannya.

Selanjutnya Nawawi memaparkan tipe dan gaya kepemimpinan diantaranya:

1. Tipe dan gaya kepemimpinan otoriter

Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) sebagai satu-satunya penentu.

2. Tipe dan gaya kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi.

3. Tipe kepemimpinan bebas

Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing. Pemimpin memberikan sedikit dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. (Saparin, 2006 ; 27).

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai

peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

C. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah adalah suatu sistem dan metode yang ketat untuk mengatur rangkaian kegiatan yang sistematis dan terkontrol secara empirik terhadap sifat-sifat dan hubungan-hubungan antar berbagai variable yang terdapat dalam fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian meminjam teori Bales dan Slater dalam Sondang (1999;50-51) yang dinyatakan bahwa ada 4 (empat) peranan pemimpin, yaitu:

- 1) *The Vision Role*, yaitu bagaimana visi yang dimiliki oleh kepala desa dalam rangkai mewujudkan *good governance* di Desa Gunggung Kecamatan Batuan;
- 2) Pengendalian dan Hubungan Organisasional, melihat bagaimana pengendalian yang dilakukan serta hubungan organisasional yang dilakukan Kepala Desa guna mewujudkan *good governance*;
- 3) Pembangkit Semangat, menekankan pada pemberian motivasi kerja terhadap bawahannya dalam perwujudan *good governance*;
- 4) Menyampaikan Informasi, merupakan penyampaian informasi-informasi publik terhadap masyarakat sehingga transparansi dalam *good governance* mudah diwujudkan.

Lokasi Penelitian

Obyek studi yang akan dijadikan dasar penulisan adalah Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Adapun pertimbangan dari penulis adalah Desa Gunggung merupakan desa yang terletak dipinggiran Kota Kabupaten Sumenep dan termasuk kategori desa tertinggal.

Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Data Primer; yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden dan hasil wawancara secara langsung di lokasi penelitian.
- 2) Data Sekunder; bentuk data sekunder yaitu berupa dokumen, surat-surat, laporan, arsip dan data lain yang ada di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.
- 3)

Instrumen Penelitian

- 1) Pedoman Wawancara; Panduan wawancara yang sudah disusun sesuai dengan masalah kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.
- 2) Observasi; peneliti juga melakukan observasi, dengan terlibat langsung dalam objek yang akan diteliti yaitu di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.
- 3) Dokumentasi; data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada berkenaan dengan peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance*.

Subjek Penelitian

Penelitian ini penulis menentukan informan, yaitu:

- 1) Informan Kunci : Kepala Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep;
- 2) Informan Utama : Sekretaris Desa dan segenap perangkat Desa serta BPD di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;

- 3) Informan Tambahan : Masyarakat Desa Gunggung dari masing-masing dusun yaitu 3 orang guna memberikan informasi tambahan bagi peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pokok penelitian untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.
- 2) Observasi yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan suatu instrumen tentang obyek yang kita teliti.
- 3) Dokumentasi yaitu data yang ada di instansi yang bersangkutan yang berupa arsip dan dokumentasi yang ada di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

Teknik Analisa Data

- 1) Reduksi Data; yaitu penajaman data dan menggolongkan membuat data yang tidak perlu mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final didapatkan.
- 2) Penyajian Data; yaitu berupa sekumpulan data dan informasi tersusun yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan dengan melihat penyajian data ini maka dapat diketahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- 3) Menarik Kesimpulan; penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

E. Hasil Penelitian

Peranan Kepala Desa dimaksud meliputi : 1) *The Vision Role*, 2) Pengendalian dan Hubungan Organisasional, 3) Pembangkit Semangat, dan 4) Menyampaikan Informasi.

The Vision Role

Salah satu peran yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki visi kedepan dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya. Kepala Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep juga memiliki visi yang cukup mulia yaitu terciptanya Tata Kelola Pemerintah yang baik di Desa Gunggung. Hanya saja kemuliaan visi yang dimilikinya ini masih belum terkonsep dengan baik dan kurang terukur dengan baik pula. Hal ini terbukti dengan tidak dipublikasikannya visi tersebut serta belum diwujudkannyatakannya dalam visi yang dimiliki oleh organisasinya yaitu pemerintahan desa.

Walaupun demikian, Kepala Desa Gunggung telah melakukan upaya yang cukup maksimal dalam mewujudkan impiannya tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah Kepala Desa Gunggung lakukan guna mewujudkan visinya, ialah :

1. Mengayomi bawahan; mengayomi dimaksud yaitu dengan cara terus memberikan perhatian dan mengapresiasi apa yang telah perangkat desa lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Mengarahkan; yaitu sebuah arahan yang Kepala Desa lakukan supaya perangkat desa mau dengan sepenuh hati melakukan apa yang menjadi instruksinya. Sehingga dengan ini dipersepsi akan mampu mewujudkan mimpi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; yaitu dengan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari upaya-upaya itulah, diprediksi akan mampu mewujudkan impian dari Kepala Desa Gunggung dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik di Desanya. Satu hal yang cukup menarik sebenarnya terletak pada satu prinsip yang dimiliki oleh Kepala Desa yaitu pembenahan di internal pemerintahnya. Karena beliau beranggapan bahwa ketika penataan pemerintahan di internal ini sudah baik, sikap dan kemampuan perangkatnya baik pula, maka pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Jika melihat model penataan yang dilakukan yaitu model top down dimana penataan yang dilakukan dari atas terlebih dahulu baru kemudian kebawah.

Pengendalian Dan Hubungan Organisasional

Peran ini sudah Kepala Desa Gunggung jalankan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan Kepala Desa Gunggung dalam mengendalikan pemerintahan desa yang meliputi:

1. Keuangan dan aset organisasi
Kepala Desa Gunggung mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Artinya penggunaan keuangan desa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa, baik dalam hal operasionalisasi kegiatan dan program serta bantuan-bantuan sosial lainnya dalam pembangunan desa gunggung.
2. Kinerja Organisasi
Kepala Desa Gunggung juga telah mampu meningkatkan kinerja organisasinya. Hal ini dikarenakan adanya pengendalian dari kepala desa terhadap perangkat desanya agar mampu dan dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Kondusifitas Organisasi
Kepala Desa Gunggung juga telah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif baik dalam tubuh pemerintah desa maupun ditingkat masyarakat. Dari ini sudah menunjukkan pula bahwa Kepala Desa telah mampu menjalankan peran sebagai pengendali dan hubungan organisasional.

Pembangkit Semangat

Kepala Desa memberikan semangat kepada seluruh perangkat desa meliputi:

1. Pujian, yaitu berupa penghargaan dan insentif yang diberikan kepada perangkat desa yang telah mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Dukungan, yaitu berupa kata-kata yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kalimat-kalimat sugestif yang diberikan oleh Kepala Desa Gunggung terhadap bawahannya.
3. Punishment
Adanya sanksi bagi perangkat desa yang melanggar ketentuan yang berlaku dan lalai dalam menjalankan tugas fungsinya. Dari penerapan sanksi ini ternyata telah dapat meningkatkan semangat kerja yang dimiliki oleh perangkat desa di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep.

Menyampaikan Informasi

Peran inipun juga sudah Kepala Desa jalankan dengan cukup baik. Artinya, Kepala Desa sudah memberikan informasi – informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat desa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi langsung, Kepala Desa lakukan ketika pada acara pertemuan-pertemuan desa, sedangkan informasi tidak langsung adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui aparaturnya atau perangkat desanya. Tentunya terlebih dahulu sudah ada komunikasi dan arahan dari kepala desa terhadap para perangkatnya.

Walaupun informasi yang disampaikan sudah cukup baik, namun sangat disayangkan karena Kepala Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kurang memanfaatkan media dan teknologi informasi yang telah berkembang pesat saat ini. Sehingga informasi tidak cepat didapat dan diketahui oleh masyarakat. Jangankan media teknologi informasi, papan pengumumanpun yang ada dibalai desa ini kurang difungsikan oleh Pemerintah Desa dalam penyampaian informasi.

Disamping itu, informasi yang disampaikan ini tidaklah terlalu dirinci. Sehingga mengakibatkan efek praduga yang kurang baik dari masyarakat Desa Gunggung. Seperti dalam hal penyampaian informasi keuangan yang disampaikan hanya secara umum saja.

E. Kesimpulan

The Vision Role

Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pemimpin yang memiliki visi jauh kedepan (*visioner*), hanya saja visi yang dimilikinya ini masih terlalu besar dan sulit dijangkau. Hal ini diketahui dengan belum adanya konsep dan perencanaan yang jelas dalam pencapaian visi tersebut.

Pengendalian Dan Hubungan Organisasional

Dalam menjalankan peran ini, Kepala Desa Gunggung lebih menitik tekankan pada pengendalian terhadap Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dan skill yang dimiliki oleh perangkat desa dibandingkan Sumber Daya lainnya seperti Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Sarana Prasarana (Fasilitas) yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Gunggung.

Pembangkit Semangat

Untuk peran pembangkit semangat ini, Kepala Desa telah memerankannya dengan cara memberikan motivasi kepada bawahannya. Jenis motivasi tersebut berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan bawahannya.

Menyampaikan Informasi

Kepala Desa Gunggung dalam menjalankan peran sebagai penyampai informasi juga telah dilakukan dengan cukup baik. Hanya saja informasi yang disampaikan ini menimbulkan efek praduga negatif, karena informasi yang disampaikan kurang diperinci.

F. Daftar Pustaka

- Alijoyo, 2004, *Good Governance dan Clean Governance*, Balai Pustaka. Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Asdi Mahasatya.
- Daniri , 2006, *Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan public*, Rosdakarya. Bandung
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006
- Moleong, J. Lexy. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- , 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
-, 2009. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2006. *Leadership. (gaya, tipologi, fungsi,praktek)*.TUGU. Yogyakarta
- Suyanto, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial (berbagai alternative pendekatan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Widodo, Djoko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kris Yuliani, 2002. *Pemimpin dan kepemimpinan di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Perundang-undangan**
- Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 dalam Pelayanan Publik di Era Reformasi.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ;
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.